

Judul : Ditargetkan Selesai Periode Ini : Pembahasan RUU SDA Baru Sebatas Periksa Tata Bahasa
Tanggal : Minggu, 02 Desember 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Roda Legislasi

Ditargetkan Selesai Periode Ini Pembahasan RUU SDA Baru Sebatas Periksa Tata Bahasa

DPR menargetkan bisa merampungkan RUU tentang Sumber Daya Air (SDA) di periode ini. Namun, pembahasannya masih sangat awal. DPR baru melakukan pengkajian terhadap tata bahasa UU SDA yang lama.

"Panja (Panitia Kerja) belum membahas berbagai konten dalam RUU tersebut. Saat ini, pembahasan RUU SDA baru sebatas tentang tata bahasa, apa yang mau diubah, serta pasal mana yang dipertahankan," ujar Anggota Panja RUU SDA Intan Fitriana Fauzi.

Namun begitu, dia optimistis bisa menyelesaikan pembahasan RUU ini. "Januari 2019 nanti kami akan membahas sekaligus merumuskan seluruh konten RUU SDA. Saya optimis, revisi UU SDA dapat diselesaikan anggota Dewan periode 2014-2019," ucap politisi perempuan PAN ini.

Mengenai isinya, Intan menegaskan, semangat utama RUU SDA adalah menjamin hak tiap warga negara untuk memperoleh air bersih. RUU merupakan implementasi UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh jaminan air bersih.

"Air bersih merupakan hak dasar manusia. Karenanya, salah satu sorotan dalam RUU SDA adalah penguasaan air bersih oleh perusahaan swasta. Harus dipisahkan antara sumber daya air dengan penggunaan air," kata anggota Komisi V DPR ini.

Intan menambahkan, secara logika, pengelolaan atau penguasaan SDA tak boleh dilakukan orang-perorang ataupun pihak swasta.

Pengelolaan air harus sama seperti batu bara, minyak bumi, maupun sumber daya alam lainnya, yakni sesuai ketentuan Pasal 33 UUD 1945.

Sebelum RUU ini, Indonesia sebenarnya sudah punya UU Nomor 7/2004. Pada Februari 2015, atas gugatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh pasal yang ada dalam UU tersebut. Dengan pembatalan itu, MK menghidupkan kembali UU Nomor 11/1974. Makanya, DPR merevisi UU tadi untuk disempurnakan sesuai kebutuhan saat ini.

"UU ini direvisi karena MK menilai UU SDA sebelumnya belum berpihak secara penuh kepada masyarakat. Kami akan menyoroti sejumlah substansi dalam revisi UU ini agar pengelolaan air sesuai UUD 1945," jelas politisi perempuan PAN ini.

Intan mengungkapkan, salah satu sorotan dalam RUU SDA adalah akses masyarakat dalam mendapatkan air bersih di sejumlah daerah, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Infrastruktur untuk memperoleh air bersih di NTT dan sejumlah daerah lain harus dipersiapkan dengan matang. Agar masyarakat mendapat jaminan ketersediaan pasokan air bersih.

"Yang menjadi persoalan di era otonomi daerah ini, lokasi sumber daya air berada pada pertemuan antarkabupaten. Lalu, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengelola? Persoalan seperti ini akan kami rumuskan, agar UU yang ada mencerminkan rasa keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat," jelasnya. ■ ONI